REVISI RENCANA STRATEGIS

Tahun 2016-2021

RENSTRA

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Jl. R. E. Martadinata No. 9 Telp. (0414) 22587. dishubkepselayar@gmail.com
Benteng - Kepulauan Selayar

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar kekuatan (strenght) , kelemahan (weakness), peluang (oppurtunity) dan tantangan (thread) selama 5 (tahun) tahun ke depan, juga strategi dalam menghadapi tantangan dan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk menata pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Kepulauan Selayar agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Perhubungan lebih kongkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana Strategis ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Dinas PerhubunganKabupaten Kepulauan Selayaruntuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Benteng, 15 Januari 2018

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
BAB I PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 7
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR **12**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 12
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 36
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 40
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR **50**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 50
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 50
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan 57
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 59
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **61**
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **64**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **68**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **93**
BAB VIII P E N U T U P **96**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 17 Februari 2016, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional . (*Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ").*

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata

dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021, mengacu kepada tugas pokok dan fungsi yang tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal, maupun masukan para *stake holders*. Namun, seiring dengan kebutuhan untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar serta tugas-tugas yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu adanya perubahan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan, berkewajiban menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 yang dilatarbelakangi adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar memuat secara keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Dinas Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan telah menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 sebagai upaya harmonisasi, sinkronisasi dan integrasi kelembagaan baru Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam dokumen RPJMD, juga sebagai upaya penyesuaian dan atau penambahan sejumlah asumsi dalam rangka penyempurnaan muatan substantif dalam dokumen RPJMD, selain hal tersebut dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD. Perubahan Renstra ini, disesuaikan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti untuk periode tahun 2016-2021 sehingga terdapat kesesuaian antara rencana jangka menengah, jangka pendek serta rencana kerja tahunannya yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan *(strenghts)*, kelemahan *(weakness)*, peluang *(opportunities)*, dan tantangan *(threats)* yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021, maka secara sinergi pula Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2016 - 2021. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 53) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2016 Nomor 185);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua jajaran dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Perhubungan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan *(stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan; dan
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas sektor perhubungan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016- 2021;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penganggaran program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja tahunan dalam jangka waktu lima tahun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021 disusun menurut sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, referensi berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang pembentukan daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, kepegawaian serta penjelasan tentang aset yang dikelola dalam rangka pemberian pelayanan mencakup aset, jenis dan kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang identifikasi permasalahan, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi/pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, telahan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, telahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan sasaran Renstra K/L, telahan Rencana Tata Ruang Wilayah, penentuan isu-isu strategis dalam pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang merupakan penjabaran dari misi, dengan lebih spesifik dan terukur termasuk rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dipaparkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan konprehensif dalam jangka waktu lima tahun medatang yang relevan dengan pernyataan visi dan misi RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tabulasi program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang direncanakan serta menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung menunjukkan apa yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan kegiatannya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah menyelenggarakan usrusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas;
3. Pelaksanaan evalusi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
4. Pelaksanaan admininstrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas;
5. Pengkoordinasian tugas-tugas yang menjadi kewenangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Setiap jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas menyelengarakan fungsi sebagai berikut :

a. Merumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Melaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Melaksanaan administraasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Mengkoordinasian tugas-tugas ynag menjadi kewenangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penaatausahaan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tatalaksana serta urusan hukum dan perundang-undangan, perencanaan, kerumahtanggan, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Dinas dan semua Bidang di Lingkungan Dinas Perhubungan;
b. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang Perhubungan;
d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang Perhubungan;
e. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;

f. Pelaksanaan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memara dan/atau mendatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
f) melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang perhubungan;
g) melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
h) melaksanakan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
i) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
j) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan

Subbagian Hukum, Perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu secretariat dalam mengumpulkan bahan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum. Uraian tugas subbagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan meliputi:

a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan member petunjuk peaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f) menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang – undangan di bidang Perhubungan;
g) melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang Perhubungan;
h) melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan;
i) melaksanakan kegiatan sosialisi di bidang Perhubungan;
j) melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang Perhubungan;
k) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dan member saran pertimbangan kepadan atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
l) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan di pimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membntu Sekratariat dalam mengumpulkan bahan

dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi :

a) menyusun rencanan kegiatan Subbagian keuangan sebagai pedoman dalam palaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan megevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atu menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f) menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;
g) menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran;
h) menyiapkan laporan pertanggung jawaban dan neraca keuangan;
i) melaksanakan koordinasi kesehatan tugas kebendaharaan;
j) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
k) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Lalu Lintas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas; dan

d. Pelaksanaan tugas lain sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan pimpinan.

Bidang Lalu Lintas membawahi tiga seksi yaitu Seksi Manajemen Lalu Lintas, Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dengan uraian tugas sebaagai berikut :

1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Seksi Manajemen Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan teknis manajemen lalu lintas. Uraian Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Manajemen Lalu Lintas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan kabupaten/kota;
g) menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota;
h) menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota;
i) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manajemen lalu lintas dengan pihak – pihak terkait;

j) menyusun laporan pelksanaan tugas Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
k) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Rekayasa Lalu Lintas di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekis Rekayasa Lalu Lintas. Uraian Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas:

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Rekayasa Lalu Lintas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f) menyiapkan bahan perumusan dan pelksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;
g) melakukan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota;
h) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manajemen lalu lintas dengan pihak-pihak terkait;
i) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi rekayasa Lalu Lintas dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
j) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaa kebijakan teknis Analisis Dampak Lalu Lintas. Uraian tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetjuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota;
g) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan analisis dampak lalu lintas dengan pihak-pihak terkait;
h) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi analisis Dampak Lalu Lintas dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
i) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Angkutan, Sarana Prasarana dan Keselamatan

Bidang Angkutan, Sarana Prasarana dan Keselamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis angkutan, sarana prasarana dan keselamatan. Untuk melaksanakan tugas yang diemban Kepala Bidang Angkutan, Sarana Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, angkutan udara, sarana prasarana dan keselamatan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, angkutan udara, sarana prasarana dan keselamatan;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, angkutan udara, sarana prasarana dan keselamatan;
d. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan angkutan orang, angkutan barang, angkutan udara, sarana prasarana dan keselamatan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain sehubungan denga tugass pokok dan fungsi yang diberikan pimpinan.

Bidang angkutan orang, angkutan barang, angkutan udara, sarana prasarana dan keselamatan mebawahi tiga seksi yaitu :

1) Seksi Angkutan Dalam Trayek, Tidak Dalam Trayek, dan Angkutan Udara;

Seksi Angkutan Dalam Trayek Tidak Dalam Trayek, dan ANgkutan Udara di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang angkutan, Sarana Prasarana, dan Keselamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis Angkutan Dalam Trayek Tidak Dalam Trayek , dan Angkutan Udara. Uraian Tuga Seksi Angkutan Dalam Trayek, Tidak Dalam Trayek, dan Angkutan Udara :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Dalam Trayek Tidak Dalam Tryek, dan Angkutan Udara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Angkutan Dalam Trayek Tidak Dalam Trayek, dan Angkutan Udara untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatagani naskah dinas;

e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang daerah kabupaten/kota;
g) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara yang beroperasi di Bandar Udara yang berada pada daerah kabupaten/kota;
h) menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
i) menetapkan rencna umum jaringa trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
j) menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
k) menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten/kota;
l) menerbitkan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
m) menetapkan tari f angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonmi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota;
n) menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota;
o) menerbitkan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota;
p) menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;

q) menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
r) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek, dan angkutan udara;
s) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek Tidak Dalam Trayek, dan Angkutan Udara dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana.

Seksi Perencanaan, Pembangunan,, dan Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan, Sarana Prasarana, dan Keselamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, dan Pengoperasian Prasarana. Uraian tugas Seksi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Prasarana, meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi PErencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Prasarana sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b) mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;

c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau, menandatangani naskah dinas;

e) mengikuti rapatsesuai bidang tugasnya;

f) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana perhubungan darat dan udara;

g) menetapkan rencana induk dan daerah lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Perhubungan Darat dan Udara;

h) menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

i) menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter;

j) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana dengan pihak-pihak terkait;

k) menyusun lap[oran pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian Prasarana dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebikan; dan

l) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengawasan Keselamatan Trasnsportasi Darat dan Udara.

Seksi Pengawasan Keselamatan Transportasi Darat dan Udara di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan, Sarana Prasarana, dan Keselamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengawasan KEselamatan Transportasi Darat dan Udara. Uraian tugas Seksi Pengawasan Keselamatan Transportasi Darat dan Udara meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Keselamatan Transportasi Darat dan Udara sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;

b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan Keselamatan Transportasi Darat dan Udara untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi ,memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat dan udara;
g) melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
h) melakukan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
i) melakukan fasilitasi manajemen dan penaganan keselamatan di jalan kabupaten/kota;
j) melakukan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
k) melakukan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
l) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan transportasi dengan pihak-pihak terkait;
m) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengawasan Keselamatan Transportasi Darat dan Udara pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut dipimpin oeh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Perhubungan Laut. Untuk melaksankan tugas yang diemban Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana pelabuhan, kepelabuhanan dan kepelautan serta pengawasan dan keselamatan pelayaran;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pelabuhan, kepelabuhanan dan kepelautan serta pengawasan dan keselamatan pelayaran;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pelabuhan, kepelabuhanan dan kepelautan serta pengawasan dan keselamatan pelayaran;
d. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pelabuhan, kepelabuhanan dan kepelautan serta pengawasan dan keselamatan pelayaran; dan
e. Pelaksanaan tugas lain sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan pimpinan.

Bidang Perhubungan Laut membawahi tiga seksi, yaitu :

1) Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan;

Seksi Sarana dan Prasaran Pelabuhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan Laut dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana Pelabuhan. Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b) mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;

c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pelabuhan;

g) menetapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal;

h) menerbitkan izin pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan local;

i) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pelabuhan dengan pihak-pihak terkait;

j) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

k) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kepelabuhanan dan Kepelautan;

Seksi Kepelabuhanan dan Kepelautan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan Laut dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Kepelabuhanan dan Kepelautan. Uraian tugas Seksi Kepelabuhanan dan Kepelautan meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Kepelabuhanan dan Kepelautan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas daam lingkungan Seksi Kepelabuhanan dan Kepelautan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keplabuhanan dan kepelautan;
g) menerbitkan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota;
h) menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota;
i) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan dan kepelautan dengan pihak-pihak terkait;
j) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kepelabuhanan dan Kepelautan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
k) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengawasan dan Keselamatan Pelayaran.

Seksi Pengawasan dan Keselamatan Pelayaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhungan Laut dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengawasan dan Keselamatan Pelayaran. Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Keselamatan Pelayaran meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Keselamatan Pelayaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan dan Keselamatan Pelayaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancanagan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan keselamatan pelayaran;
g) menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
h) membangun, menerbitkan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
i) menerbitkan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
j) menerbitkan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
k) menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
l) menerbitkan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
m) menerbitkan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local;
n) melakukan pemantauan terhadap penumpang kapal yang beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota;
o) melakukan pengawasan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran;
p) melakukan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten/kota;
q) melakukan fasilitasi promosi dan kemitraaan keselamatan pelayaran;
r) mengordinasikan jadwal dan rute pelayaran dengan pihak-pihak terkait lainnya;
s) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan dan keselamatan pelayaran dengan pihak-pihak terkait;
t) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengawsan dan Keselamatan PElayaran dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan

u) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Teknologi Informasi Transportasi

Bidang Teknologi Informasi Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Teknologi Informasi Transportasi. Untuk melaksankan tugas yang diemban Bidang Teknologi Informasi Transportasi mempunyai fungsi sebagai berukut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi informasi, pemaduan moda, data dan informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi informasi, pemaduan moda, data dan informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang pengembangan teknologi informasi, pemaduan moda, data dan informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi;
d. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan teknoogi informasi transportasi dan pemaduan moda dengan pihak-pihak terkait; dan
e. Pelaksanaan tugas lain sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan pimpinan.

Bidang Teknologi dan Informasi membawahi tiga seksi dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi dan Pemaduan Moda;

Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi dan Pemaduan Moda dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi Transportasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi dan Pemaduan

Moda. Uraian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi dan Pemaduan Moda meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi dan Pemaduan Moda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi dan Pemaduan Moda untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi informasi transportasi dan pemaduan moda;
g) melakukan riset baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan pengembangan teknologi informasi transportasi dan pemaduan moda;
h) melakukan pengembangan system komunikasi transportasi berbasis teknologi informasi secara internal pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan publik, dan fasilitasi sarana teknik telematika untuk pelayanan publik;
i) melakukan pengembangan pelayanan dan system jaringan serta piranti keras maupun piranti lunak di bidang perhubungan;
j) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan teknologi informasi transportasi dan pemaduan moda dengan pihak-pihak terkait;
k) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi dan Pemaduan Moda dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan

l) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Data dan Informasi Tansportasi;

Seksi Data dan Informasi Transportasi di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi Transportasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Data dan Informasi Transportasi. Uraian tugas Seksi Data dan Informasi Transportasi meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi Transportasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c) mamantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Data dan Informasi Transportasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi transportasi;
g) melakukan pengendalian data meliputi pengumpulan, pemutakhiran, verifikasi, perekaman, pemeliharaan, dan penyediaan data dan informasi transportasi;
h) melakukan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan data dan informasi transportasi;
i) melakukan sistem performance data/informasi bidang perhubungan agar terwujud sumber data dan informasi yang terintegrasi;
j) melakuakan pengelolaan dan penysunan database secara elektronik dalam rangka penyediaan informasi informasi kepada publik;
k) melakukan penyajian dan perluasan data dalam bentuk elektronik;
l) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan data dan informasi dengan pihak-pihak terkait;

m) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Pakan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Trasportasi.

Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Transportasi di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi Transportasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Transportasi. UraianTugas Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Transportasi meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Transportasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Transportasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai denga bidang tugasnya;
f) menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang saran dan prasarana teknologi informasi transportasi;
g) melakukan pemantauan, identifikasi, dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasaran telnologi informasi transportasi;
h) melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana teknologi informasi transportasi;
i) mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan saran dan prasarana teknologi informasi transportasi dengan pihak-pihak terkait;
j) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Transportasi dan member saran

pertimbangan kepada atasan sebagai baha perumusan kebijakan; dan

k) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan rancangan kebijakan teknis, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian di bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas yang diembannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebaagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan yang terdapat dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;
b. Pelayanan fasilitasi pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dinas Perhubungan membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas antara lain :

1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pamatata;
2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang;
3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Benteng;
4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal Jampea.

Untuk lebih sederhananya susunan organisasi Dinas Perhubungan tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri atas :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan; dan
   c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :
   a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
c. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas.

4. Bidang Angkutan, Sarana, Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
   a. Seksi Angkutan dalam Trayek, Tidak dalam Trayek dan Angkutan Udara;
   b. Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana; dan
   c. Seksi Pengawasan Keselamatan Transportasi Darat dan Udara.
5. Bidang Perhubungan Laut, terdiri atas :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan;
   b. Seksi Kepelabuhanan dan Kepelautan; dan
   c. Seksi Pengawasan dan Keselamatan Pelayaran.
6. Bidang Teknologi Informasi Transportasi, terdiri atas :
   a. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi dan Pemaduan Moda;
   b. Seksi Data dan Informasi Transportasi; dan
   c. Seksi Saran dan Prasarana Teknologi Informasi Transportasi.
7. Kelompok Jabatan fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
   a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pamatata;
   b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang;
   c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Benteng;
   d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
   e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal Jampea.

Selanjutnya susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kedudukan pendelegasian amanah masing-masing jabatan dapat dilihat dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017

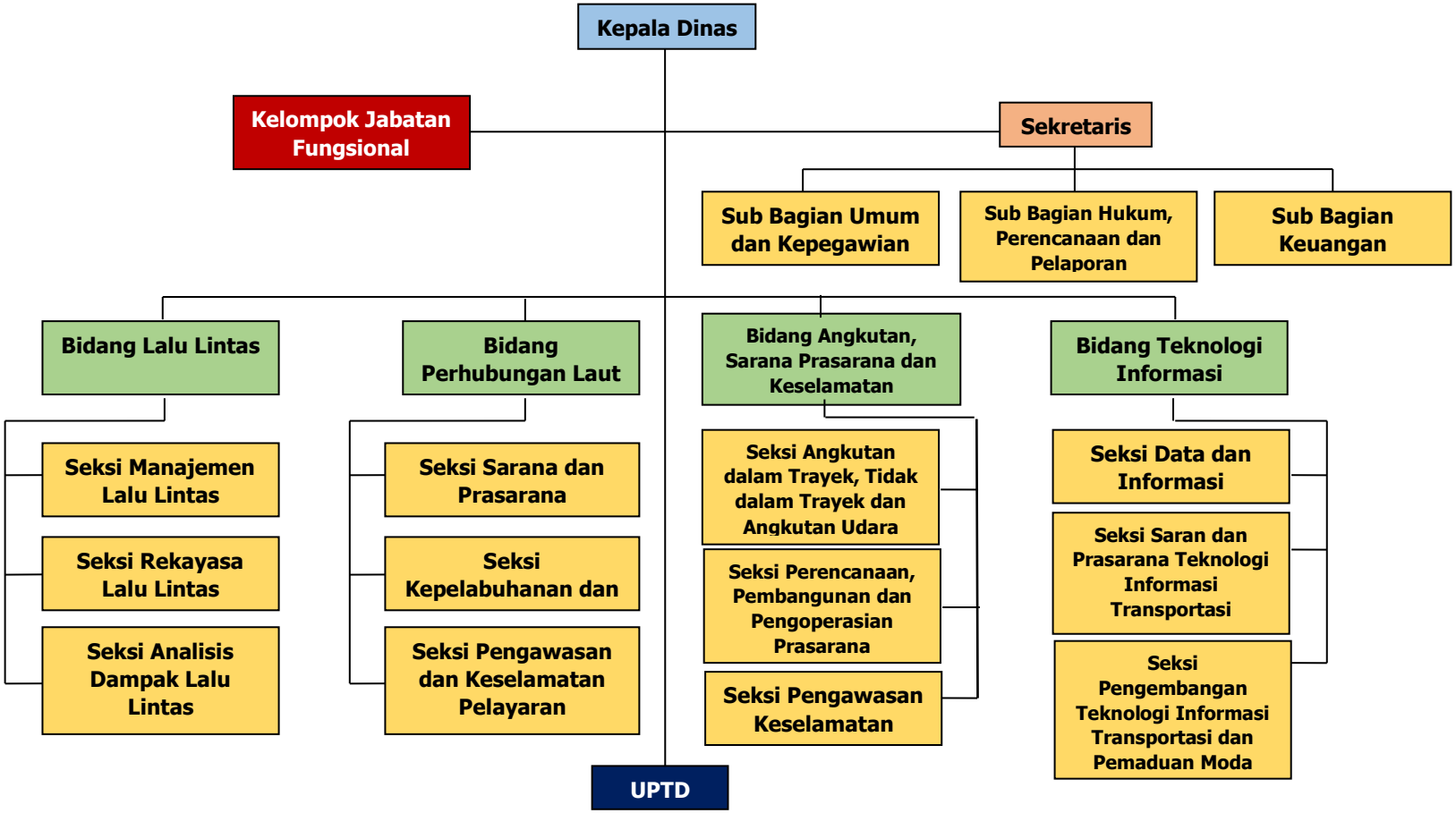

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh sumber daya yang dimiliki yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Symber daya lainnya seperti tanah, peralatan/perlengkapan/aset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan.

Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2017 dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

16. Sumber daya manusia Dinas Perhubungan menurut golongan ruang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Golongan Tahun 2017

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1.	IV	3	-	
2.	III	22	10	
3.	II	22	5	
4.	I	-	-	
5.	PTT	52	33	
6.	Sukarela	47	26	
Total		**146**	**74**	

17. Sumber daya manusia Dinas Perhubungan menurut golongan ruang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kepangkatan Tahun 2017

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1.	Pembina Utama Muda	1	-	1	
2.	Pembina	2	-	2	
3.	Penata Tk. I	3	4	7	
4.	Penata	4	2	6	
5.	Penata Muda Tk. I	5	1	6	
6.	Penata Muda	9	3	12	
7.	Pengatur Tk. I	6	2	8	
8.	Pengatur	14	1	15	
9.	Pengatur Muda Tk. I	-	-	-	
10.	Pengatur Muda	3	2	5	
Total		**47**	**15**	**62**	

18. Sumber daya manusia Dinas Perhubungan menurut tingkat pendidikan.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai								Ket
		PNS		PTT		Sukarela		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	S2	2	2	-	-	-	-	2	2	
2.	S1	15	8	12	8	4	-	31	16	
3.	D3	10	2	8	5	3	3	21	10	
4.	SLTA	20	3	33	19	37	21	90	43	
5.	SLTP	-	-	-	-	1	-	1		
6.	SD	-	-	-	-	1	1	1	1	
Total		**47**	**15**	**53**	**32**	**46**	**25**	**146**	**72**	

19. Sumber daya manusia Dinas Perhubungan yang menduduki jabatan eselon.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2017

No.	Eselon	Jumlah Pegawai		Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1.	Eselon IIB (Kepala Dinas	1	-	
2.	Eselon IIIA (Sekretaris)	-	1	
3.	Eselon IIIB (Kepala Bidang)	2	-	
4.	Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag./Kepala UPTD)	10	3	
5.	Eselon IVB (Kasubag. TU)	-	-	
Total		**13**	**4**	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Begitupun dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2017

No.	Jenis Aset	Volume		Keterangan
1	*2*	*3*		*4*
1	Tanah Bangunan Jln dan Jembatan Lain-lain	348	m2	Jl. Jammeng, Kab. Kepulauan Selaya
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	483	m3	Jl. R.E. Martadinata Kelurahan Benteng
3	Tanah Bangunan Terminal Darat	6.166	M3	Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng
4	Rumah Singgah	1	Unit	Baik
5	Bangunan Gedung Kantor	6	Unit	Baik
6	Sepeda Motor	32	Unit	Baik
7	Mobil	7	Unit	Baik
8	Kapal Motor	2	Unit	Baik
9	Meja Biro	5	Buah	Baik
10	Meja Tamu	2	Buah	Baik
11	Meja Rapat	3	Buah	Baik
12	Meja Kerja Pejabat	13	Buah	Baik
13	Meja Kerja	35	Buah	Baik
14	Meja Komputer	3	Buah	Baik
15	Kursi Kerja Pejabat	26	Buah	Baik
16	Kursi Tamu	16	Buah	Baik
17	Kursi Rapat	59	Buah	Baik
18	Kursi Putar	5	Buah	Baik
19	Kursi Lipat	47	Buah	Baik
20	Kursi Plastik	20	Buah	Baik
21	Bangku Tunggu	1	Buah	Baik
22	Lemari	28	Buah	Baik
23	Lemari Es	2	Buah	Baik
24	Filling Besi	17	Buah	Baik
25	AC	14	Unit	Baik
26	Sound System	4	Unit	Baik
27	Faximile	2	Unit	Baik
28	Mesin Potong Rumput	3	Unit	Baik
29	SSB	5	Unit	Baik
30	TV	5	Unit	Baik
31	Komputer PC	20	Unit	Baik
32	Printer	33	Unit	Baik
33	UPS	4	Unit	Baik
34	Kamera Digital	8	Unit	Baik
35	Handy Talky	46	Unit	Baik
36	Laptop	33	Unit	Baik
37	Bufet Kayu	1	Buah	Baik
38	Lampu Sorot Putar	2	Buah	Baik
39	Tempat Tidur	1	Buah	Baik
40	Note Book	2	Unit	Baik

No.	Jenis Aset	Volume		Keterangan
1	*2*	*3*		*4*
41	Hard Disk	1	Unit	Baik
42	Stavolt	1	Unit	Baik
43	Mesin Pompa Air	1	Unit	Baik
44	Traffic Light	5	Buah	Baik
45	VHF	8	Unit	Baik
46	Proyektor	2	Unit	Baik
47	Handycam	1	Unit	Baik
48	CCTV	1	Unit	Baik
49	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
50	Server	1	Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dalam usianya sampai saat ini yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan proram pembangunan daerah. Dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan merencanakan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yang telah dicapai pada jangka waktu lima tahun sebelumnya. Dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang direncanakan terdapat berbagai kendala olehnya itu dibutuhkan dukungan baik materil maupun finansial dari Pemerintah Daerah maupun pihak – pihak lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung terwujudnya program pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
7.1	Jumlah Arus penumpang angkutan umum				125.000	127.000	130.000	133.000	136.000	140.000	122.534	123.125	124.206	124.853	126.085	128.744	98%	97%	96%	94%	93%	92%
7.2	Rasio Ijin Trayek				0,80	0,90	1	1,10	1,20	1,40	0,076	0,083	0,093	0,093	0,095	0,096	10%	9%	9%	8%	7%	6%
7.3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum				130	135	140	145	150	155	145	109	121	130	142	150	111 %	80%	86%	89%	94%	96%
7.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Ferry/Udara/ Terminal Bus				2/2/1/1	3/2/1/1	4/3/1/1	5/3/2/1	6/3/2/1	7/4/2/1	1/2/1/1	1/2/1/1	7/2/1/1	7/2/1/1	7/2/1/1	7/2/1/1						
7.5	Angkutan Darat				6.500	7.500	8.000	8.500	9.000	10.000	7.130	8.297	10.037	11.432	13.374	15.070	109 %	110 %	125 %	134%	148 %	150 %
7.6	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum				200	220	240	260	280	300	242	270	181	210	222	152	121 %	122 %	75%	80%	79%	50%
7.7	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)				6 jam	6 jam	6 jam	6 jam	6 jam	6 jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	83,33%	83,33%	83,33%	83,33 %	83,33 %	83,33%
7.8	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum				7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	914 %	914 %	914 %	914%	914 %	914 %
7.9	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Terpasang (Pemasanga				110	150	160	200	250	300	117	117	147	212	336	551	106 %	78%	91%	106%	134 %	183 %

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	n Rambu-Rambu)																					
25	**Komunikasi dan Informatika**																					
25.1	Jumlah Jaringan Komunikasi				5	6	7	8	9	10	4	4	4	4	4	4	80%	66%	57%	50%	44%	40%
25.2	Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk				0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1	0,068	0,057	0,08	0,094	0,14	0,184	13%	9%	11%	11%	15%	18%
25.3	Jumlah Surat Kabar Lokal/Nasional				7	8	9	10	11	12	5	6	7	7	10	10	71%	75%	77%	70%	90%	83%
25.4	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal				1	2	3	4	5	6	3	3	3	3	3	1	300 %	150 %	100 %	70%	60%	16%
25.5	Website Milik Pemerintah Daerah				1	2	3	4	5	6	1	1	2	4	5	5	100 %	50%	66%	100%	100 %	100 %
25.6	Pameran Expo				1	2	3	4	5	6	1	1	1	1	1	1	100 %	50%	33%	25%	20%	16%
	FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR																					
1	**Perhubungan**																					
1.1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan				0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,012	0,009	0,006	0,004	0,003	0,002	1200%	450 %	300 %	100%	60%	33%
1.2	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum				100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	122.534	123.125	124.206	124.853	126.085	128.744	122 %	111 %	103 %	96%	90%	85%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1.3	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun				300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	376.143	350.959	328.429	417.923	401.342	369.175	125 %	100 %	82%	92%	80%	67%
5	**Komunikasi dan Informasi**																					
5.4	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon				35	37	39	41	43	45	41,95	41,66	41,32	40,61	40,25	41,2	119 %	112 %	105 %	99%	93%	91%

Dari realisasi dan rasio capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada periode Renstra sebelumnya tahun 2010-2015 berdasarkan tabel di atas terdapat berbagai permasalahan dalam mewujudkan pembangunan daerah khusunya pada sektor perhubungan antara lain :

1. Arus penumpang angkutan umum yang sangat rendah disebabkan oleh masih banyaknya ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalui oleh angkutan umum sehingga dibutuhkan perlunya peningkaatan kapasitas jalan;
2. Rasio ijin trayek yang sangat minim disebakan oleh tingkat pertumbuhan armada yang tidak seimbang dengan jumlah pemakai jasa sehingga dibutuhkan penertiban kembali ijin trayek angkutan umum;
3. Jumlah uji KIR angkutan umum yang peningktannya masih sangat rendah setiap tahun akibat dari fasilitas pengujian kendaraan yang belum memadai sehingga pemilik kendaraan cenderung melakukan uji kendaraan di luar daerah untuk mengatasinya perlunya pengadaan alat uji kendaraan yang memadai;
4. Jumlah pelabuhan penyeberangan yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas penyeberangan terutama di wilayah kepulauan akan fasilitas penyeberangan sehingga dibutuhkan adanya pembangunan pelabuhan penyeberangan pada wilayah kepulauan;
5. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang belum mancukupi panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga sangat diharapkan adanya pemasangan rambu lalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan;
6. Jumlah barang yang terangkut melalui pelabuhan mempunyai perkembangan yang masih rendah, hal ini disebabkan karena tidak adanya angkutan laut yang khusus untuk mengankut barang, guna mengatasi hal tersebut diperlukan adanya kapal khuus barang terutama yang melayani rute pelayaran ke wilayah kepulauan.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio anatara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	367.493.500	650.000.000	587.700.000	703.200.000	810.069.000	415.853.500	303.500.000	301.200.000	636.615.588	700.000.000	113	47	51	91	86	442.575.500	284.146.500
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.000.000	180.000.000	480.350.000	781.814.000	397.000.000	65.000.000	80.950.000	116.250.000	740.893.650	945.000.000	100	45	24	95	238	332.000.000	880.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	110.000.000	40.000.000	100.000.000	80.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	85.777.800	125.000.000	150	45	125	86	156	60.000.000	95.000.000
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	420.000.000	350.000.000				395.340.000	286.440.000				94	82				- 420.000.000	-
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.833.702.000	4.220.000.000	4.026.061.000	4.476.291.000	1.643.014.700	1.902.100.000	334.101.000	1.700.000.000	4.107.578.639	1.402.222.000	104	8	42	92	85	- 190.687.300	- 499.878.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	63.095.000	220.000.000	120.000.000	170.000.000	300.000.000	3.095.000			165.474.000	475.000.000	5	-	-	97	158	236.905.000	471.905.000
Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.065.548.500	1.765.000.000	2.154.400.000	1.095.841.000	1.249.250.000	566.208.500	404.900.000	408.500.000	1.001.064.163	1.833.206.000	53	23	19	91	147	183.701.500	1.266.997.500
Pengawasan Sarana dan Prasarana Berbasis Wilayah	10.000.000	280.000.000	83.000.000	321.750.000	125.000.000		15.000.000	15.000.000	319.675.600	325.000.000	-	5	18	99	260	115.000.000	325.000.000
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		425.000.000	523.183.000	815.191.000	740.048.000	289.202.000	302.525.000	600.000.000	749.203.050	844.352.000		71	115	92	114	740.048.000	555.150.000
Pengembangan Komunikasi dan Informasi		150.000.000	250.300.000	242.000.000	270.000.000		50.000.000	50.000.000	207.182.200			33	20	86	-	270.000.000	-
Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah			182.257.000	14.788.000		36.400.000	1.795.186.000		14.788.000				-	100		-	- 36.400.000
Pengembangan Kawasan Bandara	100.000.000			1.231.100.000					931.639.800	1.270.000.000	-			76		- 100.000.000	1.270.000.000

Dari segi pendanaan pada pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar boleh dikatan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan fasilitas di bidang perhubungan. Hal ini tentunya terjadi karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang rata-rata membutuhkan serapan anggaran yang besar, seperti pembangunan pelabuhan laut, pembangunan pelabuhan penyeberangan, pengadaan angkutan laut, pengadaan angkutan penyeberangan dan lain-lain.

Selain hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis terkait pelayanan bidang perhubungan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan ketersediaan dana yang cukup terutama dalam rangka koordinasi dengan jajaran pada level yang lebih tinggi yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Perhubungan serta kementerian lain yang terkait pembangunan bidang perhubungan guna mendapatkan kucuran dana pelaksanaan program kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Disadari bahwa usaha dari dalam lingkungan internal saja sangat tidak memungkinkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tentunya terkait dengan keterbatasan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, selain dari lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, lingkungan eksternal tentunya sangat pula diharapkan partisipasi dan kerjasamanya. Lingkungan eksternal tersebut seperti OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintahan di tingkat level yang lebih tinggi seperti Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemerintah Pusat yaitu melalui Kementerian Perhubungan.

Dengan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen diharapkan akan mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merata disegala lapisan masyrakat. Dari keberhasilan pembangunan di bidang perhubungan tentunya akan mendorong dan menjadi penopang pencapaian pembangunan pada sektor-sektor lain seperti pariwisata, perekonomian, perikanan, pertanian dan sebagainya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan anatara lain sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Sulawesi menyebabkan akan pentingnya sarana prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakata Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Kondisi alam Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan daerah kepulauan dengan gugusan pulau yang begitu banyak serta luas wilayah dimana lebih luas lautan dipada daratannya sehingga untuk menghubungkan anatara satu pulau dengan pulau yang lain tentunya sangat membutuhkan kesiapan sektor perhubungan baik sarana maupun prasarananya.
3. Sebagai salah satu daerah bahari dengan kekayaan hasil laut yang sangat melimpah tentunya sangat membutuhkan peran sektor perhubungan melalui ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk dapat menggali, mengelolah dan memanfaatkan kekayaan alam laut tersebut sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat.
4. Sebagai salah satu daerah yang kaya akan potensi wisata baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata kreatif tentu membutuhkan dukungan dari berbagai sektor untuk dapat menggali, mengembangkan dan mempromosikan kekayaan wisata tersebut, yang tentunya sektor

perhubungan tidak lepas akan peran dan partisipasinya yang sangat besar dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang mampu mendorong berkembangnya sentra-sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata terutama dalam upaya pemenuhan ketersediaan sarana transportasi untuk menjangkau ke setiap kawasan wisata.

5. Belum adanya dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Kepulauan Selayar yang tentunya tidak terlepas dari Tatranas (Tatanan Transportasi Nasional) dan Tatralok Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi acuan utama dalam menyusun, merancang dan menata sistem jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan wilayah sebagai akibat dari tingkat keterhubungan antarwilayah baik itu antardesa, antarkecamatan maupun antarpulau dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar atau bahkan antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kabupaten lainnya sehingga terwujud pemerataan aksesibilitas dan mobilitas bagi segenap kepentingan masyarakat di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Terbatasnya kemampuan APBD pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk fokus membiayai pembangunan di sektor perhubungan sehingga dibutuhkan bantuan berupa dana maupun sarana baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak swasta yang mau berinvestasi di sektor perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Di samping tantangan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas terdapat pula peluang yang dianggap penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah tepatnya pada bidang perhubungan yang merata bagi setiap lapisan masyarakat, antara lain :

1. Posisi strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang jika dilihat pada wilayah Negara kita, terletak pada titi tengah baik itu dari timur ke barat maupun dari utara ke selatan. Hal ini tentunya mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pusat peralihan transportasi baik dari wilayah timur maupun dari wilayah barat Indonesia atau dengan kata lain Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjadi daerah transit bagi kapal-kapal laut yang berlayar dari Timur Indonesia menuju Indonesia bagian Barat atau sebaliknya, selain itu dapat pula menjadi daerah transit

bagi pesawat udara yang hendak terbang melintasi dua wilayah Indonedia tersebut.

2. Beroperasi dan berkembangnya Bandara H. Aroeppala, Pelabuhan Penyeberangan Pamatata dan Pelabuahan Laut Benteng yang menjadi pintu gerbang utama Kabupaten Kepulauan Selayar dari jalur transportasi udara, transportasi darat dan transportasi laut.
3. Perkembangan teknologi infoormasi yang semakin pesat dan canggih dapat dimplementasikan dalam pembangunan sektor perhubungan sehingga dapat membantu dalam hal efisiensi dan efekifitas penggunaan anggran serta dapat mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan serta akses masyrakat terhadap pelayanan jasa perhubungan dan transportasi.
4. Potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar yang sangat melimpah baik dari sektor perikanan, pertanian, pariwisata maupun dari sektor lainnya yang tentunya membutuhkan peran penting sektor perhubungan untuk dapat mengeksplor dan mendistribusikan semua potensi tersebut sehingga memiliki nilai guna bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan baik pelabuhan laut, udara termasuk terminal bus, secara keseluruhan telah terlaksana. Hanya saja, masih perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan semakin tingginya tingkat kebutuhan masayarakat terhadap akses layanan perhubungan, terutama di sektor pelayanan transportasi, serta mengupayakan pemerataan infrastruktur dengan pola keterpaduan moda transportasi wilayah antara darat, laut dan udara.

Dari data yang diperoleh, masih ada beberapa aspek yang menjadi masalah selama ini antara lain; Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2014 sebesar 126.085 dan meningkat menjadi 128.744 pada tahun 2015. Sementara itu, masih banyak ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalaui oleh angkutan umum. Sementara pada sisi lain, keadaan sarana pendukung fasiltas pelabuhan laut/ferry/udara/ terminal bus belum lengkap. Oleh sebab itu, diharapkan adanya upaya peningkatan dan penambahan fasilitas pendukung pelabuhan laut, ferry, udara, dan terminal bus termasuk perbaikan jalan sebagai satu kesatuan moda transporasi yang tidak terpisahkan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan, isu pembangunan daerah dan isu strategis nasional dan provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005 – 2025, visi pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, adalah :

" ***Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural"***

Dalam rumusan visi tersebut terdapat tiga pokok visi yakni: 1) Masyarakat maritim sejahtera; 2) Nilai keagamaan; dan 3) Nilai kultural. "Masyarakat Maritim yang Sejahtera" adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, "Nilai Keagamaan" dan "Nilai Kultural" adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

"Masyarakat Maritim yang Sejahtera", mengandung dua pengertian kondisi, yakni masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai masyarakat maritim, dan masyarakat Kepulauan Selayar sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam pokok visi ini tercakup berbagai fokus terkait kesejahteraan masyarakat dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor serta kesejahteraan sosial, keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam yang unggul, serta produktivitas dan daya saing daerah.

"Berbasis Nilai Keagamaan", mengandung pengertian bahwa masyarakat Selayar dalam lima tahun ke depan akan semakin mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dan rukun serta menempatkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan motivasi serta basis nilai utama dalam kehidupan.

"Berbasis Nilai Kultural" mengandung pengertian bahwa dalam lima tahun ke depan kebudayaan daerah akan semakin berkembang dalam merespon dinamika kebudayaan nasional dan global. Dalam pokok visi ini tradisi dan kearifan lokal ditempatkan sebagai unsur yang akan terlestarikan secara dinamis.

3.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah 2016 – 2021 sebagaimana dikemukakan di atas, ditetapkan 7 misi, yaitu :

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan.

Misi ini mencakup; Upaya-upaya dalam menciptakan situasi kondusif pada seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat bagi kehidupan beragama; Membangun pusat kajian agama dan budaya; Mendorong pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas penyelenggaraan ibadah; Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan.

   Misi ini mencakup upaya-upaya; Mewujudkan kepemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; Menerapkan *e-government* dalam peningkatan pelayanan publik; Meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta penerapan sistem *punishment and reward*; Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Menjaga dan memelihara ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat; Melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu; dan Membangun kesadaran politik; serta Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

   Misi ini berfokus pada upaya-upaya; Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya kualitas manusia. Tercakup didalamnya upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi serta peningkatan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk keluarga berencana (KB) dan kesejahteraan keluarga; Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; dan Membina kegiatan kepemudaan, membudayakan, serta dan meningkatkan prestasi keolahragaan.

4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata.

   Misi ini mencakup upaya-upaya; Pengembangan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas dari dan ke Selayar, serta meningkatkan prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan yang terintegrasi wilayah daratan dan kepulauan; Mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, air, dan energi; khusus pengembangan jalan pada wilayah daratan pulau Selayar, diarahkan agar terkoneksi dan searah dengan pengembangan sektor-sektor strategis lainnya; Berkembangnya sentra-sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta Kawasan Industri Perikanan Terpadu, dan menjadikan Selayar sebagai pusat budidaya ikan karang; Memberikan akses dan kemudahan berinvestasi; serta Mendorong kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Pemerintah dalam upaya mempercepat dan mengoptimalkan dukungan kebijakan untuk terealisasinya kebijakan dan program daerah yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah.

   Misi ini berfokus pada; Peningkatan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tercakup didalamnya upaya membangun sentra pengembangan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan; Meningkatkan kesadaran dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

6. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan.

Misi ini berfokus pada upaya-upaya; Peningkatan produktivitas dari bidang usaha ekonomi yang berkembang khususnya yang berbasis kerakyatan. Tercakup di dalamnya upaya pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi berbasis teknologi pada masyarakat; Dukungan permodalan dan manajemen bagi usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan daya saing; serta Mencetak wirausahawan pada desa dan kelurahan.

7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan.

   Misi ini berfokus pada; Strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah lokal dan penguatan lembaga adat; Pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

3.2.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta program dan janji politik Bupati – Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2016 – 2021 yang telah disampaikan kepada masyarakat pada masa kampanye, Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan dalam tiga bagian, meliputi : Program – Program Bupati – Wakil Bupati yang disampaikan pada saat masa kampenye yang disebut PROGRAM SUCI; Program-Program yang merupakan Kontrak Politik Bupati Terpilih yang kemudian ditetapkan sebagai Program Prioritas; dan Program-Program yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Terpilih atau dsebut juga Program RPJMD. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Program SUCI

Program SUCI (Sehat, Unggul, Cerdas, dan Infrastruktur) Program-Program Bupati – Wakil Bupati yang disampaikan pada saat masa kampanye, meliputi :

1) Penataan struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintah untuk bergerak secara sinergis dan produktif;
2) Menerapkan *E-Government* dalam peningkatan pelayanan publik;
3) Meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberlakukan sistem prestasi kerja dan karir;
4) Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat;
5) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
6) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
7) Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
8) Mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, dan air bersih/minum;
9) Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang terintergrasi di daratan dan kepulauan;
10) Mengembangkan destinasi dan atraksi budaya serta meningkatkan promosi wisata;
11) Memberikan akses dan kemudahan investasi wisata;
12) Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah dalam membangun sinergitas dalam pengelolaan sumber daya kemaritiman;
13) Membangun sentra pengembangan komoditas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
14) Meningkatkan kesadaran dan upaya pelestarian fungsi lingkungan;

15) Memberikan peluang dan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi bagi masyarakat yang berbasis pada teknologi;
16) Memberikan dukungan permodalan dan manajemen bagi UKM dalam meningkatkan daya saing serta mencetak 1.000 wirausahawan yang tersebar di masing-masing desa dan kelurahan;
17) Menjaga dan memelihara ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat;
18) Melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu;
19) Membangun kesadaran politik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi;
20) Membangun pusat studi pengkajian agama dan budaya.

2. Program Prioritas

Program prioritas adalah program-program yang merupakan kontrak politik Bupati Terpilih yang terdiri dari empat belas program, diantaranya terdapat salah satu perogram yang mengarah pada sektor perhubungan, yaitu bantuan makan minum bagi penumpang kapal ferry yang pelayarannya tertunda di Pelabuhan Bira Bulukumba.

3. Program RPJMD

Pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 34 program pembangunan daerah yang diharapkan akan mampu mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun program pembangunan darerah yang dengan pembangunan pada sektor, adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jasa Perhubungan dan Transportasi;
2) Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perhubungan dan Transportasi;
3) Program Peningkatan Layanan Jasa Perhubungan dan Transportasi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, maka kebijakan penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan; dan
4. Meningkatakan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberi nilai tambah.

Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan Renstra Kementrian Perhubungan Tahun 2015-2020 adalah :

1. meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. meningkatnya minat masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana, transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antarwilayah;
3. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *back log* dan *bottle neck* kapasitas infrastruktur transportasi;
4. peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
5. terwujudnya pengembangan teknologi transportasi yang efisien.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2020 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2020 berdimensi kewilayahan (perpulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.

Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan adalah sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah berupa dukungan pendanaan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan terutama di wilayah kepulauan guna mendorong pengembangan konektifitas antarpulau, antardesa dan antarkecamatan;
2. Pengadaan sarana transportasi seperti angkutan penyeberangan dalam rangka memberikan pelayanan aksesibilitas dan mobilitas yang merata terhadap masyarakat, angkutan umum untuk menjangkau wilayah-wilayah pedesaan, serta angkutan khusus untuk kawasan pariwisata guna mendukung peningkatan pembangunan sektor pariwisata; dan
3. Pembangunan dan pengelolaan, prasarana, sarana dan fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas;

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa kebijakan penyelenggaraan pembangunan di Bidang Perhubungan, antara lain :

1. Pembangunan angkutan massal berbasis rel dan berbasis jalan;
2. Pembangunan pengelolaan prasarana dan fasilitas keselamatan perhubungan darat;
3. Peningkatan kapasitas perhubungan udara;
4. Peningkatan kapasitas perhubungan laut;
5. Pengembangan pendidikan unggulan transportasi;
6. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;

7. Peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
8. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan *(level of service),* kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan;
10. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjuang prasarana lalu lintas;
11. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu dibangun sarana dan prasarana terminal yang representatif;
12. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan; dan
13. Meningkatkan dan mengembangkan keterpaduan pada rencana tata ruang dan dinamika perkembangan masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tantang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan.

Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata, diarahkan pada kawasan yang memiliki objek dan daya tarik wisata yang mendukung pelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) yang telah menetapkan Daerah Pariwisata Nasional (DPN) Makassar-

Takabonerate dan sekitarnya dan 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Toraja dan Takabonerate Selayar.

Hal ini dipertegas dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dimana pengembangan wilayahnya diarahkan dengan mengacu pada RTRWN. KSPN Toraja diarahkan untuk pengembangan wisata budaya dan KSPN Takabonerate Selayar diarahkan untuk pengembangan wisata bahari.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Perhubungan meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan bidang perhubungan pada kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu meliputi :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan keselamatan jalan;
2. Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi;
3. Belum optimalnya pergerakan penumpang dan barang dari daratan ke kepulauan dan sebaliknya;
4. Belum optimalnya penyediaan jaminan kecelakaan; dan
5. Belum tersedianya fasilitasi penyediaan bantuan makan minum bagi penumpang fery yang tertunda di Pelabuhan bira.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek serta merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi atau perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	TUUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel(S-2)	Opini atas laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	C	CC	B	B	BB	BB
			Skor evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EKPD)	T	T	T	ST	ST	ST
2	Meningkatan Kemampuan membuka isolasi daerah (T-8)	Meningkatkan aksesibilitas dari dan ke Selayar (S-15)	Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat (%)	23	29	35	41	46	46
				160	200	240	280	320	320
			Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut (%)	8	10	12	13	15	15
				40	50	60	70	80	80
			Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui	40	46	50	56	65	65

NO.	TUUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			moda transportasi udara (%)	502	576	624	704	816	816
3	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar (T-9)	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar (S-16)	Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	67	67	67	100	100	100
				2	2	2	3	3	3
			Berfungsinya Bandara Kayuadi (%)	10	25	50	75	100	100
				RTT sisi Darat dan Udara	Pembebasan Lahan	Study KKOP dan Amdal	Pemb. Fisik Sisi Darat dan Udara	Fungsional	Fungsional
			Jumlah Pelabuhan Laut (%)	45	55	65	75	85	85
				9	11	13	15	17	17
			Perluasan terminal angkutan darat (%)	48	56	65	73	81	81
				60	70	80	90	100	100
			Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (%)	33	67	67	83	100	100
				2	4	4	5	6	6
4	Meningkatkan keterintegrasian wilayah daratan dan pulau-pulau (T-11)	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan (S-18)	Tingkat kelancaran arus barang dan penumpang dari dan ke wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	25	30	35	40	45	45
				63.000	76.000	89.000	103.000	115.000	115.000

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah *(value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Mengacu pada teori tersebut diatas serta berdasar pada hasil analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah arah kebijakan dalam rangka mewujudkan

tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Lima tahun kedepan.

Adapun relevansi dan konsistensi anatara pernyataan visi dan misi rencana pembangunan daerah pada RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	**Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Milai Keagamaan dan Kultural**		
Misi II	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel(S-2)	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas pengeloalaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran
			Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas manajemen aset daerah
	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)	Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor	Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah
			Peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas manajemen Aparatur Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya	Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system

		penerapan punishment dan reward	
Misi IV	**Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kemampuan membuka isolasi daerah (T-8)	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Selayar (S-15)	Meningkatkan layanan jasa perhubungan dan transportasi	Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan transportasi
Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar (T-9)	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar (S-16)	Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi	Penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut dan udara
Meningkatkan keterintegrasian wilayah daratan dan pulau-pulau (T-11)	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan (S-18)	Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau	Penyediaan infrastruktur kepelabuhanan
			Penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan tersebut merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat, sebagai arah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program kegiatan memiliki tolak ukur keberhasilan berupa indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel(S-2)		Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	50.000.000	100%	165.000.000	100%	-	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumenLaporan Keuangan Semesteran yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan stansar akuntansi pemerintah		1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000										
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan stansar akuntansi pemerintah		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	30.000.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengelolaan dan Penyusunan Data Base Informasi Transportasi Berbasis Elektronik	Tersedianya Data Base Informasi Transportasi Berbasis Elektronik				1 Dokumen	100.000.000										
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laopran keuangan yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah								8 Laporan	20.000.000	8 Laporan	25.000.000	8 Laporan	25.000.000		
			Penyusunan Laporan Aset	Jumlah dokumen laopran aset yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan stansar akuntansi pemerintah								9 Laporan	20.000.000	9 Laporan	25.000.000	9 Laporan	25.000.000		
	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)		Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100%	125.000.000	100%	25.000.000	100%	40.000.000	100%	370.000.000	100%	435.000.000	100%	435.000.000		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000							-	-		
			Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra		1 Dokumen	100.000.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Perhubungan	Jumlah dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Perhubungan yang telah dilaksanakan						1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000		
			Penyusunan Renja Dishub	Tersusunnya dokumen Renja yang sesuai apa yang direncanakan								2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000		
			Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD yang disusun sesuai apa yang direncanakan								4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	30.000.000		
			Pelaksanaan Tim Tindak Lanjut Dishub	Persentase terselesaikannya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK								100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000		
			Penyusunan LAKIP SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD								1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000		
			Penyusunan LPPD SKPD	Tersusunnya LPPD SKPD								1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000		
			Penyusunan LKPJ SKPD	Tersusunnya LKPJ SKPD								1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000		
			Penyusunan RFK SKPD	Tersusunnya RFK SKPD								2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000		
			Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan	Persentase usulan program dan kegiatan yang terakomodir pada Kerja Teknis Bidang Perhubungan								50%	140.000.000	50%	150.000.000	50%	150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adiminstrasi porkantoran		100%	930.690.000	100%	1.289.697.000	100%	1.153.700.000	100%	1.477.000.000	100%	1.565.000.000	100%	1.565.000.000		
			Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa komonikasi sumber daya air dan Listrik		100%	48.000.000	100%	50.000.000	100%	77.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		
			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	20.000.000	100%	67.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Persentase pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		100%	422.690.000	100%	475.000.000	100%	320.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000		
			Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Administrasi Perkantoran dalam menukung kinerja		100%	430.000.000	100%	679.697.000	100%	721.700.000	100%	800.000.000	100%	880.000.000	100%	880.000.000		
			Peringatan Hari Perhubungan Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Perhubungan Nasional				1 Kali	50.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas dalam mendukung pelasanaan kinerja		100%	488.900.000	100%	500.000.000	100%	256.050.000	100%	700.000.000	100%	580.000.000	100%	580.000.000		
			Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		6 Unit	88.000.000	3 Unit	60.000.000			3 Unit	75.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		22 Unit	107.900.000	10 Unit	120.000.000	5 Unit	25.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan				10 Unit	33.000.000			10 Unit	30.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	30.000.000		
			Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		19 Unit	25.000.000	30 Unit	70.000.000			4 Unit	35.000.000	4 Unit	35.000.000	4 Unit	35.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedungkantor		100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	20.000.000	100%	250.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Persentase pemeliharaan mobil jabatan		100%	75.000.000	100%	70.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun	130.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		100%	156.000.000	100%	100.000.000	100%	94.550.000	100%	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan peralatan gedung kantor		100%	7.000.000	100%	10.000.000	100%	6.500.000	100%	30.000.000	5 Kali	20.000.000	5 Kali	20.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaanperlengkapan gedung kantor		100%	5.000.000	100%	7.000.000			100%	10.000.000	5 Kali	15.000.000	5 Kali	15.000.000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur		100%	-	100%	170.000.000	100%	40.000.000	100%	75.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000		
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang diadakan				70 Set	50.000.000	60 Set	40.000.000	100 Set	75.000.000	100 Set	75.000.000	100 Set	75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Tersedianya 'Mesin Kartu Absensi				1 Unit	10.000.000										
			pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya 'Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya				80 Set	35.000.000					100 Set	50.000.000	100 Set	50.000.000		
			Pengadaan Pakian LLAJ dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakian LLAJ dan Perlengkapannya										30 Set	50.000.000	30 Set	50.000.000		
			Pengadaan Perlengkapan Petugas LLAJ	'Tersedianya Perlengkapan Petugas LLAJ				30 Set	75.000.000										
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur dalam mendukung pelasanaan kinerja		100%	95.000.000	100%	75.000.000	100%	30.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
			Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	30.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
			Peningkatan SDM Aparatur Bidang Perhubungan Laut	Persentase aparatur Bidang Perhubungan Laut yang mengikuti pendidikan pelatihan teknis		100%	50.000.000												
			Peningkatan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi	Persentase aparaturBidang Teknologi Informasi yang mengikuti pendidikan pelatihan teknis				100%	30.000.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatan Kemampuan membuka isolasi daerah	Meningkatkan aksesibilitas dari dan ke Selayar		Program Pengembangan dan Keselamatan Transportasi	Persentas penurunan jumlah kejadian kecelakaan transportasi		27%	-	58%	-	31%	499.000.000	36%	1.175.000.000	75%	1.405.000.000	75%	1.405.000.000		
			Pemeliharaan Fasilitas Keselamatn Jalan	Jumlah Fasilitas Keselamatan jalan yang terpeliharah						20 Unit	20.000.000	15 Unit	45.000.000	25 Unit	50.000.000	25 Unit	50.000.000		
			Kampanye Keselamatan Pelayaran	Jumlah Masyarakat yang mengerti Keselamatan Pelayaran						100 Orang	39.400.000	100 Orang	40.000.000	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000		
			Pengadaan Peralatan Keselamatan Pelayaran	Jumlah Pemilik Kapal Laut yang memiliki Peralatan Keselamatan Pelayaran								2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000		
			Pemeliharaan Rambu Suar	Jumlah Rambu suar yang terpelihara								2 Unit	35.000.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	40.000.000		
			Sosialisasi Selayar Dalam Genggamanku	Jumlah Masyarakat yang mengakses aplikasi Selayar Dalam Genggamanku						200 orang	9.000.000			300 orang	35.000.000	300 orang	35.000.000		
			Sosialisasi/penyuluhan peningkatan keselamatan Transportasi bagi sopir, juru mudi angkutan	Jumlah sopir, juru mudi angkutan yang faham keselamatan transportasi										150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000		
			Survey Kepadatan Lalu Lintas	Terlaksananya Survey Kepadatan Lalu Lintas										1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000		
			Survey Kapasitas Jalan	Terlaksananya Survey Kapasitas Jalan										1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Survey Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan/Keselamatan Jalan	Terlaksananya Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan/Keselamatan Jalan										1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000		
			Sosialisasi tertib lalu lintas	Jummlah Masyarakat yang faham peraturan lalu lintas										100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.000		
			Sosialisasi Andalalin	Jummlah Masyarakat yang faham tentang Andalalin								100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000		
			Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Penerbangan	Jumlah Masyarakat yang faham Keselamatan Penerbangan										100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000		
			Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Teknologi Informasi Transportasi	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Teknologi Informasi Transportasi								1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000		
			Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan	Jumlah Alat Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan yang terpasang								1 Unit	275.000.000						
			Pengadaan dan Pemansangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang								2 Paket	400.000.000	3 Paket	500.000.000	3 Paket	500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Gantarang Lalang Bata	Jumlah Guadrail yang terpasang						1 Unit	141.950.000								
			Pembangunan Pengaman Jalan/Guadrail Desa Tanete	Jumlah Guadrail yang terpasang						1 Unit	96.700.000								
			Pembangunan Pengaman Guadrail Tile-Tile Lembangia Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu	Jumlah Guadrail yang terpasang						1 Unit	191.950.000								
			Pengadaan dan Pemasangan Alat pengawasan Lalu Lintas Persimpangan Jalan secara Elektronik	JumlahAlat pengawasan Lalu Lintas Persimpangan Jalan secara Elektronik yang terpasang										1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	
			Penyusunan data base fasilitas keselamatan Jalan	Tersusunnya data base fasilitas keselamatan Jalan										1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	
			Fasilitasi Pengembangan Transportasi	Tersedianya Rencana Pengembangan Transportasi									25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	
			Koordinasi Pengembangan Transportasi	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Transportasi									50.000.000	10 Kali	50.000.000	10 Kali	50.000.000	10 Kali	
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase keterpenuhan transportasi yang aman dan tertib yang berbasis teknologi informasi		285%	200.000.000	38%	270.000.000	57%	175.450.000	77%	395.000.000	100%	840.000.000	100%	840.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Tersusunnya laporan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ		5 Laporan	100.000.000	3 Laporan	50.000.000								-		
			Penunjang Operasioanl Kapal Fiber Glass	Persentase keterpenuhan Operasional Kapal Fiber Glass		2 Unit	100.000.000												
			Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, Peryaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan adan Even Daerah	Jumlah Kendaraan pada arus angkyutan Lebaran Natal, Tahun Baru, Peryaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan adan Even Daerah				2500 Unit	50.000.000	3000 Unit	38.020.000	3500 Unit	60.000.000	4000 Unit	60.000.000	4000 Unit	60.000.000		
			Operasi Penertiban Terpadu Lalu Lintas Bersama Instansi Terkait	Jumlah Operasi Penertiban Terpadu Lalu Lintas Bersama Instansi Terkait yang dilaksanakn				5 Kali	50.000.000	4 Kali	32.400.000	20 Kali	55.000.000	20 Kali	60.000.000	20 Kali	60.000.000		
			Pemanduan dan Pengendalian LLAJ / Tamu Daerah, Event Daerah dan Luar Daerah	JumlahPemanduan dan Pengendalian LLAJ / Tamu Daerah, EventDaerah dan Luar Daerah yang dilaksanakn				3 kali	50.000.000	3 kali	26.100.000	3 kali	60.000.000	3 kali	55.000.000	3 kali	55.000.000		
			Penunjang Operasional Petugas LLAJ	Persentase keterpenuhan Operasional Petugas LLAJ				100%	70.000.000					100%	50.000.000	100%	50.000.000		
			Koordinasi Forum LLAJ	Terssusunnya laporan Koordinasi Forum LLAJ										1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penunjang Operasioanl Petugas Parkir	Persentase Keterpenuhan operasional Petugas Parkir										100%	240.000.000	100%	240.000.000		
			Pengawasan Lalu Lintas Jalan	Persentase Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan										100%	60.000.000	100%	60.000.000		
			Penunjang Operasional Bidang Lalu Lintas	Persentase keterpenuhan Operasional Bidang Lalu Lintas						100%	37.850.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000		
			Pelaksanaan dan Evaluasi andalalin	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi andalalin						10 Kali	28.200.000	10 Kali	35.000.000	10 Kali	40.000.000	10 Kali	40.000.000		
			Survey andalalin	Tersedianya Data Kebutuhan Andalalin										1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000		
			Temu teknis Pelaksanaan andalalin	Terlaksananya Temun teknis Pelaksanaan andalalin								1 Kali	60.000.000	1 Kali	45.000.000	1 Kali	45.000.000		
			Survey Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas	Jumlah Survey Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas yang dilaksanakan						5 Kali	12.880.000	1 Kali					-		
			Pengadaan Aplikasi Layanan aduan masyarakat	Jumlah Aplikasi Layanan aduan masyarakat yang dibuat										1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000		
			Study Banding Pengawasan Lalu Lintas Persimpangan Jalan Secara Elektronik	Tersusunnya laporan Study Banding Pengawasan Lalu Lintas Persimpangan Jalan Secara Elektronik								1 Laporan	70.000.000				-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar		Program Pembagunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase peningkatan kapasitas Prasarana dan fasilitas transportasi		45%	9.041.854.500	52%	1.400.000.000	64%	3.110.000.000	45%	2.655.000.000	50%	2.050.000.000	50%	2.050.000.000		
			Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		1 Laporan	150.000.000			2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000		
			Pembangunan Tambatan Perahu (lanjutan)	Jumlah Pembangunan Tambatan Perahu (lanjutan)		2 Unit	8.550.000												
			Pemeliharaan Rambu Suar (lanjutan)	Jumlah Rambu Suar yang dipeliharah (lanjutan)		1 Unit	5.000.000												
			Penyusunan Study Kelayakan dan Master Plan Bandara Kayuadi untuk peingkatan dari Bandar Carapan menjadi Bandara Perintis (lanjutan)	Tersusunnya Study Kelayakan dan Master Plan Bandara Kayuadi untuk peingkatan dari Bandar Carapan menjadi Bandara Perintis (lanjutan)		1 Dokumen	209.697.000												
			Pembongkaran tower sebelah selatan Bandara H. Aroeppala (lanjutan)	tower sebelah selatan Bandara H. Aroeppala yang terbongkar (lanjutan)		1 Unit	45.000.000												
			Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Nyiur Indah (lanjutan)	Terpeliharanya Tambatan Perahu Desa Nyiur Indah (lanjutan)		1 Unit	4.500.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembangunan Gerbang di Dermaga Desa Nyiur Indah (lanjutan)	Terbangunnya Gerbang di Desa Nyiur Indah (lanjutan)		1 Unit	1.800.000												
			Pembangunan Fasilitas Tambatan Perahun Desa Nyiur Indah (lanjutan)	Terbangunnya Fasilitas Tambatan Perahun Desa Nyiur Indah (lanjutan)		1 Unit	1.657.500												
			Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahun Dusun Tangnga-tangnga Desa Tambolongan (lanjutan)	Terbangunnya Tambatan Perahun Dusun Tangnga-tangnga Desa Tambolongan (lanjutan)		1 Unit	6.750.000												
			Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Desa Kayu Bauk Kec. Bontomatene	Terpasangnya Guadrail Desa Kayu Bauk Kec. Bontomatene		1 Unit	200.000.000												
			Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene	Terpasangnya Guadrail Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene		1 Unit	200.000.000												
			Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Desa Tanete Kec. Bontomatene	Terpasangnya Guadrail Desa Tanete Kec. Bontomatene		1 Unit	200.000.000												
			Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai	Terpasangnya Guadrai Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai		1 Unit	200.000.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Rehab Pelabuhan Penyeberangan Pamatata	Terpeliharanya Jalan menuju Dermaga Penyeberangan Pamatata		500 m	2.950.600.000												
			Pelaksanaan DAK Keselamatan Transportasi Darat	Terlaksananya pembangunan Guadrail		2 Unit	363.290.000												
			Pelaksanaan DAK IPD	Terlaksananya Pembangunan Tambatan Perahu		20 Unit	3.995.710.000												
			Perbaikan MB (Moveable Bridge) Pelabuhan Penyeberangan Pamatata	TerpeliharanyaMB (Moveable Bridge) Pelabuhan Penyeberangan Pamatata		1 Unit	80.000.000												
			Rehabilitasi Lantai Jembatan Penghubung MB Pelabuhan Penyeberangan Pamatata	Terpeliharanya Lantai Jembatan Penghubung MB Pelabuhan Penyeberangan Pamatata		1 Unit	70.000.000												
			Pembangunan Tambatan Perahu Desa Khusus Bahuluang Kec. Bontosikuyu	Terbangunnya Tambatan Perahu Desa Khusus Bahuluang Kec. Bontosikuyu		1 Unit	149.700.000												
			Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Parak Selatan Desa Parak	Terbangunnya Tambatan Perahu Dusun Parak Selatan Desa Parak		1 Unit	199.600.000			1 Unit	198.200.000								
			Feasibility Study Pengembangan Pelabuhan di Kepulauan	Jumlah dokumen Feasibility Study Pengembangan Pelabuhan di Kepulauan yang tersusun				1 Dokumen	800.000.000	3 Dokumen	797.600.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Feasibility Study Pembangunan Dermaga Plensengan di Kepulauan	Jumlah Feasibility Study Dermaga Plensengan di Kepulauan yang tersusun								5 Kecamatan	1.000.000.000						
			Feasibility Study Pengembangan Pelabuhan Pattumbukang	Jumlah dokumen Study Pengembangan Pelabuhan Pattumbukang yang tersusun				1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	397.900.000								
			Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Kolo-kolo Bitombang	Terpasangnya Guadrai Kolo-kolo Bitombang				1 Unit	200.000.000										
			Pembangunan Fasilitas penyimpanan BBM (Bunker) Pelabuhan Pattumbukang	Jumlah Fasilitas penyimpanan BBM (Bunker) Pelabuhan Pattumbukan yang terbangun										1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000		
			Pembangunan Pintu Gerbang	Jumlah Pintu Gerbang yang terbangun								3 Paket	600.000.000						
			Penyusunan Masterplan Bandara Karumpa	Jumlah dokumen Masterplan Bandara Karumpa yang tersusun										1 Dokumen	800.000.000	1 Dokumen	800.000.000		
			Penyusunan Study Pengembangan Transportasi	Jumlah dokumen Study Pengembangan Transportasi yang tersusun										1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000		
			Pembangunan Halte	Jumlah halte yang terbangun								1 Paket	70.000.000				-		
			Penyusunan Data Base Perhubungan	Jumlah dokumen data base perhubungan yang tersusun								1 Dokumen	30.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								1 Paket	500.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000		
			Pembangunan Tambatan Perahu	Jumlah Pembangunantambatan perahu								1 Paket	200.000.000	3 Paket	600.000.000	3 Paket	600.000.000		
			Pembangunan Pos Jaga	Jumlah Pembangunan Pos Jaga								1 Paket	100.000.000						
			Penambahan Panjang Dermaga Ujung Jampea	Panjang tambahan dermaga Ujung Jampea						100 m	996.400.000								
			Pembangunan Tambatan perahu Manarai Desa Bontoborusu	TerbangunnyaTambatan perahu Manarai Desa Bontoborusu						1 Unit	198.200.000								
			Rehabilitasi Dermaga Appatanah Pantai Timur	Terpeliharanya Dermaga Appatanah Pantai Timur						1 Unit	98.500.000								
			Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Batang Kec. Takabonerate	Terpeliharanya Tambatan Perahu Desa Batang Kec. Takabonerate						1 Unit	150.000.000								
			Pembangunan Tambatan Perahu Tanamalala	Panjang Tambatan Perahu Tanamalala yang terbangun						15 m	198.200.000								
			Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan yang terbangun								1 Paket	75.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase peningkatan kapasitas Prasarana dan Fasilitas LLAJ		100%	124.000.000	26%	170.000.000		-		-		-		-	Dinas Perhubungan	
			Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpelihara		1 unit	20.000.000	2 Unit	25.000.000										
			Pemeliharaan Traffic Light	Jumlah traffick light yang terpelihara		3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000										
			Pemeliharaan Rambu Suar	Jumlah Rambu suar yang terpelihara		3 unit	45.000.000	3 unit	45.000.000										
			Rehabilitasi MB dan hidrolik dermaga pattumbukang	Terpeliharanya MB dan hidrolik dermaga pattumbukang		1 Unit	9.000.000												
			Pengadaan dan Pemasangan Signage Letter 3D welcome to Kepulauan Selayar	Terpasangnya Signage Letter 3D welcome to Kepulauan Selayar				1 Unit	50.000.000										
Meningkatkan keterintegrasian wilayah daratan dan pulau-pulau	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi		23%	1.358.779.600	26%	1.490.000.000	53%	613.700.000	74%	890.779.920	95%	1.026.280.413	95%	1.026.280.413	Dinas Perhubungan	
			Penunjang Operasional Bus Sekolah	Persentase siswa dari luar kota yang menuntut ilmu di Kota Benteng yang menggunakan jasa Bus Sekolah		20%	200.000.000	25%	200.000.000	30%	172.000.000	35%	200.000.000	40%	220.000.000	40%	220.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penunjang Operasional UPTD Pelabuhan Pamatata	Persentase keterpenuhan Operasional UPTD Pelabuhan Pamatata		100%	135.000.000	100%	180.000.000										
			Penunjang Operasional UPTD. Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang	Persentase keterpenuhan Operasional UPTD Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang		100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	52.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		
			Penunjang Operasional UPTD. Terminal Angkutan Darat Benteng	Persentase keterpenuhan Operasional UPTD Terminal Angkutan Darat Benteng		100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	30.000.000								
			Penunjang Operasional UPTD. Pelabuhan Laut Lokal Jampea	Persentase keterpenuhan Operasional UPTD Pelabuhan Laut Lokal Jampea		100%	20.000.000	100%	35.000.000	100%	25.000.000								
			Penunjang Operasional UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase keterpenuhan Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor		100%	35.000.000	100%	60.000.000	100%	32.000.000	100%	47.500.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
			Penunjang Operasional UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata	Persentase keterpenuhan Operasional UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata						100%	80.000.000	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000		
			Penunjang Operasional UPTD. Terminal dan Perparkiran	Persentase keterpenuhan Operasional UPTD Terminal dan Perparkiran								100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penunjang Operasional UPTD. Pelabuhan Laut Lokal	Persentase keterpenuhan Operasional UPTD Pelabuhan Laut Lokal								100%	37.500.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000		
			Penunjang Operasional Bidang Perhubungan Laut	Persentase keterpenuhan Operasional Bidang Perhubungan Laut		100%	61.800.000	100%	75.000.000	100%	38.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
			Penunjang Operasioanl Bidang Angkutan, Sarana Prasarana dan Keselamatan	Persentase keterpenuhan Operasional Bidang Angkutan, Sarana Prasarana dan Keselamatan				100%	58.387.800	100%	110.800.000		100.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000		
			Penunjang Operasioanl Bidang Teknologi Informasi Transportasi	Persentase keterpenuhan Operasional Bidang Teknologi Informasi Transportasi				100%	100.000.000			100%	82.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000		
			Koordinasi dan Pemantauan Keselamatan Pelayaran	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Pemantauan Keselamatan Pelayaran		1 Laporan	20.000.000										-		
			Koordinasi dan Konsultasi Angkutan Penerbangan	Peningkatan Angkutan Penerbangan		100%	150.178.284	1 Laporan	65.080.200								-		
			Koordinasi dan Konsultasi Angkutan Penyebrangan	Peningkatan Angkutan Penyebrangan		100%	25.000.000										-		
			Penunjang Operasional Bidang Perhubungan Udara	Persentase keterpenuhan Operasional Bidang Perhubungan Udara		100%	101.801.316	100%	11.532.000								-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan	Tersedianya Mobil Angkutan Pedesaan		1 Unit	350.000.000												
			Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, Peryaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan adan Even Daerah	Jumlah Kendaraan pada arus angkyutan Lebaran Natal, Tahun Baru, Peryaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan adan Even Daerah		2000 Unit	100.000.000												
			Penunjang Operasional Bidang Perhubungan Darat	Persentase keterpenuhan Operasional Bidang Perhubungan Darat				100%	50.000.000									-	
			Pengembangan Pelayanan dan sistem jaringan transportasi	Tersusunnya sistem jaringan transportasi				1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	26.400.000	1 Dokumen	43.779.920	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		
			Publikasi Data informasi secara Elektronik	Jumlah Data yang Publikasikan Secara Elektornik				12 Data	50.000.000	18 Data	26.100.000	24 Data	50.000.000	30 Data	51.280.413	30 Data	51.280.413		
			Penunjang Operasioanl Kapal Fiber Glass	Persentase keterpenuhan Operasional Kapal Fiber Glass				2 Unit	50.000.000					2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000		
			Fasilitasi Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Pamatata	Persentase Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Pamatata				100%	35.000.000								-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi Penyelenggaraan pengolahan data dan informasi transportasi	Tersusunyadata dan informasi transportasi				1 Dokumen	50.000.000								-		
			Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Teknologi Informasi Transportasi	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Teknologi Informasi Transportasi				1 Laporan	100.000.000										
			Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersusunnya laporan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				2 Laporan	80.000.000										
			Study Banding/Kunjungan Kerja Rencana Penyusunan Perda tentang Parkir Berlangganan	Tersusunnya Laporan Study Banding/Kunjungan Kerja Rencana Penyusunan Perda tentang Parkir Berlangganan				1 Lap	70.000.000								-		
			Monitoring dan Pengolahan data moda transportasi	Tersusunnya Data Moda Transportasi						1 Dokumen	21.400.000						-		
			Monitoring dan dan Evaluasi pengembangan Teknologi Informasi	Tersusunya Laporan Pengembangan Teknologi Informasi								1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000		
Total							**12.414.224.100**		**5.554.697.000**		**5.917.900.000**		**7.877.779.920**		**8.276.280.413**		**8.276.280.413**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengertian kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donelly, Gibson and Ivancevich, 1994). Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai apa yang diharapkan maka perlu ditetapkan suatu indikator yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapian tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	55.135	55.135	63.000	76.000	89.000	103.000	127.000
2	Rasio ijin trayek	0,0963	0,0963	0,0995	0,1027	0,1059	0,1091	0,1155
3	Jumlah uji kir angkutan umum	163	163	163	170	175	180	190
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	7/1/1	9/2/1	11/2/1	13/2/1	15/2/1	17/2/1	20/2/1
5	Kepemilikan KIR angkutan umum	124	160	200	240	280	320	360
6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam
7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
8	Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat (%)	18	23%	29%	35%	41%	46%	52%
		124	160	200	240	280	320	360
9	Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut (%)	6%	8%	10%	12%	13%	15%	17%
		30	40	50	60	70	80	90
10	Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara (%)	36%	40%	46%	50%	56%	65%	70%
		455	502	576	624	704	816	881
11	Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	33%	67%	67%	67%	100%	100%	100%
		1	2	2	2	3	3	3
12	Berfungsinya Bandara Kayuadi (%)	2,5%	10%	25%	50%	75%	100%	100%

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Study Peny. Master Plan	RTT sisi Darat dan Udara	Pembebasan Lahan	Study KKOP dan Amdal	Pemb. Fisik Sisi Darat dan Udara	Fungsional	Fungsional
13	Jumlah Pelabuhan Laut (%)	35%	45%	55%	65%	75%	85%	100%
		7	9	11	13	15	17	20
14	Perluasan terminal angkutan darat (%)	40%	48%	56%	65%	73%	81%	89%
		50	60	70	80	90	100	110
15	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (%)	33%	33%	67%	67%	83%	100%	100%
		2	2	4	4	5	6	6
16	Tingkat kelancaran arus barang dan penumpang dari dan ke wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	22%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
		55.135	63.000	76.000	89.000	103.000	115.000	127.000

BAB VIII
P E N U T U P

Renana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan yang dibuat sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adanya perubahan dalam struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu untuk memperbaharui Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Renstra ini akan dijadikan dasar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang nantinya diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu, Renstra ini dapat pula menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 15 Januari 2018

Tim Penyusun,